

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan Nomor:02/Pra.Pid/2016/PN.RAP). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan ?, (2) Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam putusan Praperadilan Nomor:02/Pra.Pid/2016/PN.RAP ?, (3) Bagaimana pelaksanaan hukum atas putusan Praperadilan Nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP ?.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan studi kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian ini adalah Aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan, sesuai dengan pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang berisikan tentang alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan, yaitu: 1. Tidak terdapat cukup bukti 2. Bukan merupakan tindak pidana 3. Penyidikan dihentikan demi hukum. Pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam putusan praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP, dari aspek yuridis telah memenuhi pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Yakni hanya ada tiga alasan penghentian penyidikan, namun dalam perkara ini penyidik telah menjadikan adanya “Perdamaian antara korban dan tersangka” sebagai dasar dan alasan dikeluarkannya Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan, oleh karena itu dasar dan alasan penyidik tersebut adalah diluar yang diatur oleh KUHAP sehingga dibatalkan dalam putusan Praperadilan dengan Nomor :02/Pra.Pid/2016/PN.RAP. Pelaksanaan hukum atas putusan hakim Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP adalah penyidik harus melanjutkan penyidikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh TITO SYAHPUTRA Dan Kawan-Kawan (DKK). Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan maka penyidik akan diberikan sanksi administratif karena telah melanggar Pasal 14 huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 14/2011).

Kata Kunci :Praperadilan, Putusan Hakim, Penganiayaan

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legal Analysis of Judge Decisions in the Case of Criminal Acts of Persecution conducted by Market Security of Gelugur Rantauprapat (Study of Pretrial Decision Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP)". Formulation of the problem in this research are: (1) How legal rules regarding the Termination of Investigation and Prosecution (SP3) in cases of torture ? (2) What is the legal consideration of a court decision that grants a pretrial petition in a pretrial decision Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP ?, (3) How is the legal implementation of the Pre-trial decision Number : 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP ?.

The method used in the writing of this thesis is to use the normative juridical method, using the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Study.

The results of this study are the legal rules regarding the Termination of Investigation and prosecution (SP3) in cases of criminal abuse, in accordance with article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which contains the reasons for terminating the investigation, namely: 1. There is not enough evidence 2. Not enough evidence constitutes a criminal offense 3. Investigation is stopped by law. Legal considerations of court decisions that grant pretrial requests in pretrial decisions Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP, from the juridical aspect have fulfilled article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Namely there are only three reasons for termination of the investigation, but in this case the investigator has made the existence of "Peace between the victim and the suspect" as the basis and the reason for the issuance of the Decree on the Termination of the Investigation, therefore the grounds and reason for the investigator are beyond those regulated by the Criminal Procedure Code and thus canceled in the pretrial decision with Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP. The implementation of the law on the decision of the pretrial judge Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP is that the investigator must continue the investigation of the case of torture carried out by TITO SYAHPUTRA and Friends (DKK). If the decision is not implemented, then the investigator will be given administrative sanctions for violating Article 14 letter j Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police Number 14 of 2011 concerning the Professional Ethics Code of the Indonesian National Police (Perkapolri 14/2011).

Keywords: Pretrial, Judge's Decision, Persecution